

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI KAUM RAWAN (DIFABEL) DI KOTA
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Pengajuan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

ANDRE DWI SETIAWAN
NIM. 4118126

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI KAUM RAWAN (DIFABEL) DI KOTA
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Pengajuan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

ANDRE DWI SETIAWAN
NIM. 4118126

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andre Dwi Setiawan

NIM : 4118126

Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Kaum Rawan (Difabel) Di Kota Pekalongan
Dalam Perspektif Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya tulis penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 September 2022

Yang menyatakan,


ANDRIE DWI SETIAWAN
NIM. 4118126

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, S.E.I., M.S.I

Perumahan De Afta Residence A5, Winong, Gejlik, Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Andre Dwi Setiawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN K.H. Abdurrahman Wahid

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Andre Dwi Setiawan**

NIM : **4118126**

Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kaum Rawan (Difabel) di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Islam**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 September 2022

Pembimbing



Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, S.E.I., M.S.I

NIP. 19870311 201908 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 52 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Andre Dwi Setiawan**
NIM : **4118126**
Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kaum Rawan (Difabel) Di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Islam**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Ade Gunawan, MM.
NIP. 198104252015031002

Penguji II

Husni Awali, M.M.
NIP. 19890929019031016

Pekalongan, 31 Oktober 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH
YANG BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN*

SOPO WONGE SING TEKUN BAKAL TEKAN

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi ini

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Orangtua tercinta Bapak Toni Winarto dan Ibu Suyanti yang selalu memberikan semangat dan tiada henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kakakku, Desi Citra Pujayanti dan suaminya Muhammad Romadhon serta Intan Ayuning Safitri yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang berada di Pekalongan dan keluarga besar Bani Marsup di Surabaya yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu tanpa mengurang rasa cinta saya kepada mereka yang terus memberikan saya do'a, motivasi, dan fasilitas.
4. Sahabat-sahabatku Anis, Khaqiqi, Fahmi, Baridna, Mufti, Riyan, Rudi, Raihan, Kani dan semua teman-temanku seperjuangan satu jurusan S1 Ekonomi Syariah angkatan 2018
5. Teman-temanku yang belajar bersama di organisasi kampus UKM-F Kewirausahaan, sahabat-sahabati PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam.

ABSTRAK

ANDRE DWI SETIAWAN. Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kaum Rawan (Difabel) di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Islam.

Kaum difabel merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang harus diperhatikan, karena dengan keterbatasannya sebagian besar mengalami kesulitan salah satunya dalam hal ekonomi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 yang menjelaskan berkaitan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan tidak diragukan lagi memiliki hak yaitu diberikan kesejahteraan dalam hidupnya. Hal itu juga ditinjau dalam perspektif agama Islam yang merupakan agama *rahmatan lil alamin* merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada makhluk di alam raya mengajarkan bahwa kita sebagai manusia wajib hukumnya membantu sesama kepada orang yang tidak berdaya dan tentu beritikad untuk menyamaratakan sesama manusia tidak terkecuali kaum difabel.. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekalongan terhadap kaum rawan (difabel) terutama menurut perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitatif, peran edukasi, dan peran teknis sudah berperan cukup baik, sedangkan dalam perspektif Islam sudah memenuhi prinsip prinsip seperti prinsip ukhuwah, prinsip ta'awun, dan prinsip keadilan namun diperlukannya peningkatan lebih baik lagi supaya lebih maksimal dan lebih merata dan terarah dalam hal pemberdayaannya.

Kata kunci: Peran Dinas Sosial, Islam, Difabel

ABSTRACT

ANDRE DWI SETIAWAN. The Role of the Social Service for the Economic Empowerment of the Vulnerable (Disabled) in Pekalongan City in an Islamic Perspective.

People with disabilities are one of the community groups in Indonesia that must be considered, because with their limitations, most of them experience difficulties, one of which is in terms of the economy. As stated in the Pekalongan City Regional Regulation (Perda) Number 9 of 2017 which explains the welfare and fulfillment of the rights of persons with disabilities and no doubt have rights that are given in their lives. It is also reviewed in the perspective of Islam which is the religion of rahmatan lil alamin which is a form of mercy and compassion of Allah SWT to creatures in the universe, teaches that we as humans are obligated to help fellow people who are helpless and of course intend to help fellow humans not to help the people. people with disabilities. In this study, the researcher aims to determine the role of the Pekalongan City Social Service towards the vulnerable (disabled), especially from an Islamic perspective.

This study uses a qualitative method with the technique of making informants using purposive sampling, and data analysis using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. With data sources using primary data and secondary data.

The results showed that the facilitative role, educational role, and technical role had played a fairly good role, while in the Islamic perspective it had fulfilled the principles such as the principle of ukhuwah, the principle of ta'awun, and the principle of justice but the need for improvement is even better so that it is more optimal and more efficient. equitable and focused in terms of empowerment.

Keywords: Role of Social Service, Islam, Disability

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karen atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH selaku Dekan FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Muhammad Aris Safi'i M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Happy Sista Devy, MM selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. M. Aris Safi'i, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
6. Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen dan staff yang selama ini sudah memberikan ilmunya dan melayani mahasiswa dengan baik.

8. Bapak Wildan Zuhad, S.E, M.Si selaku Pekerja Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bapak Trieska Hermawan, S.STP serta para pegawai staff Dinas Sosial Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
9. Bapak, Ibu, Kakak, dan sahabat-sahabat penulis yang penulis yang selalu memberikan kontribusi moral dan supportnya dalam penulisan Skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa, cara penulisannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Mei 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Konsep Peran.....	13
2. Disabilitas atau Difabel.....	24
3. Kedudukan Kaum Difabel Dalam Perspektif Islam.....	27
B. Telaah Pustaka.....	34

BAB III

METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Setting Penelitian.....	46
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Keabsahan Data.....	51
H. Metode Analisis Data.....	52

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Peran Dinas Sosial Dalam Melakuka Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kaum Rawan (Difabel) di Kota Pekalongan.....	55
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekalongan.....	55
2. Visi Misi.....	62
3. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekalongan.....	63
4. Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel di Kota Pekalongan.....	78
5. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Oleh Dinas Sosial Terhadap Kaum Difabel di Kota Pekalongan.....	82
6. Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kota Pekalongan.....	87
B. Tinjauan Perspektif Islam Terkait Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilakukan Dinas Sosial Terhadap Kaum Rawan (Difabel) di Kota Pekalongan.....	89
1. Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel Oleh Dinas Sosial Kota Pekalongan.....	89
2. Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel Oleh Dinas Sosial Kota Pekalongan Dalam Perspektif Islam.....	92

BAB V

PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda dan harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah (Vokal Panjang)

Dilambangkan dengan harkat dan huruf, ditransliterasikan dengan huruf dan tanda.

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ي...ا	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ؤ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'marbutah

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t". Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-atfāl.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Contoh : طَلْحَةُ di tulis talḥah.

c. Jika pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanā, الْبِرِّ ditulis al-birr.

6. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna, إِنَّ ditulis inna.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Telaah Pustaka, 35
Tabel 4.1	Bentuk Kegiatan dan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Dinas Sosial Kota Pekalongan, 81
Tabel 4.2	Daftar Difabel Kecamatan Pekalongan Barat, 84
Tabel 4.3	Daftar Difabel Kecamatan Pekalongan Selatan, 84
Tabel 4.4	Daftar Difabel Kecamatan Pekalongan Timur, 85
Tabel 4.5	Daftar Difabel Kecamatan Pekalongan Utara, 85

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Berfikir, 44
- Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekalongan, 78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara, I
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara, IV
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian, XXV
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, XXVI
- Lampiran 5 Dokumentasi, XXVII
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup, XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut data pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dan menghasilkan data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini relatif cukup banyak, sehingga penelitian mengenai populasi ini menjadi penting. Rencana pemerintah tentang pemberdayaan dan penyamarataan hak penyandang disabilitas agar sama dengan manusia normal biasa, khususnya dalam hal penghidupan, juga belum terlaksana. 30,38 juta orang, atau 14,2% dari populasi Indonesia, mengalami disabilitas, data tersebut diambil dari Susenas tahun 2018. Demikian pula data kesejahteraan sosial yang telah diintegrasikan Kementerian Sosial pada Januari 2020 yang menggambarkan bahwa status sosial ekonomi sangat vital untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat (Hastuti et al., 2020). Sedangkan di Kota Pekalongan menurut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari Dinas Sosial Tahun 2021 menunjukkan ada 1.235 orang atau 24,96% penyandang disabilitas di Kota Pekalongan yang terdiri dari disabilitas yang ringan dan berat (Dinas Sosial, 2022).

Indonesia, sebagai negara berkembang yang bercita-cita untuk meningkatkan di segala bidang, termasuk infrastruktur dan sumber daya non fisik seperti mental dan sumber daya manusia. Dengan populasi kurang lebih 267 juta orang, ini merupakan yang terbanyak dan masuk peringkat keempat

di dunia setelah Negara Amerika Serikat diperingkat ketiga. Populasi penyandang disabilitas fisik dan mental, terkadang dikenal sebagai individu penyandang disabilitas, berjumlah sekitar 22 juta orang atau 9% dari total populasi, (Krisnada & Widodo, 2019). Di Indonesia, pembangunan nasional mempunyai komponen penting didalamnya yaitu pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk mencapai keadilan social dan pemerataan, maka dari itu pokok atau prinsip dasarnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemanusiaan sosial, hal itu merupakan bagian tersendiri dari pembangunan berskala nasional. Dari tujuan pembangunan kesejahteraan sosial diatas menunjukkan semua elemen masyarakat bisa ikut termasuk tidak terkecuali bagi seorang difabel (Abdi et al., 2020):

Di Kota Pekalongan, tentu ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur daerah yang bersangkutan. Setiap pemerintahan, tanpa membedakan suku, warna kulit, agama, atau keragaman lainnya, termasuk penyandang disabilitas, harus memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 yang menjelaskan berkaitan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, memiliki hak yaitu diberikan kesejahteraan dalam hidupnya, serta yang memiliki hak asasi dan kedudukan hukum yang mendukung dengan penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu bagian dan tidak terpisahkan dari warga negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas atau yang juga dikenal dengan istilah difabel adalah setiap orang yang telah lama mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau keterbatasan serta menghadapi tantangan dan kesulitan dalam melakukan kegiatan di sekitarnya. Atas dasar kesamaan hak, secara utuh dan efektif dengan masyarakat yang lainnya (Indonesia, 2016). Karena keberadaan, rintangan, tantangan, dan pembatasan atau pengurangan hak-hak kepada para difabel, mayoritas difabel di Negara Indonesia hidup dalam situasi rentan, terbelakang kekurangan atau miskin. (Prasojo, 2020).

Manusia, menurut pandangan Islam, merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan keunikannya dibanding makhluk lain dan ciri khasnya pada diri masing-masing, Teori kesetaraan, sering dikenal sebagai doktrin kesetaraan, menyatakan bahwa orang-orang secara sosial dan politik sama. Kemudian, karena dipandang semua manusia secara sosial dan politik sama, mereka semua harus juga diperlakukan dengan rasa hormat dan perhatian yang adil (non-diskriminatif). Baik dipandang dari segi pencapaian keadilan soal hukum dan kesempatan, maupun dari segi kependidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Khoirudin, 2019). Manusia memiliki HAM, sebagian ciri Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Rabbaniyah, artinya bahwa yang sama sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah semua mengenai hak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (An-nisa [4]:58)

Seperti penelitian (Pujianti, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa Di Kota Pangkalpinang, aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Beberapa lokasi umum belum memiliki fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang cacat, sementara yang lain memiliki tetapi tidak pada tingkat yang sama. Menurut penelitian, minimnya aksesibilitas ruang bagi penyandang disabilitas disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, sehingga minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ada juga kekhawatiran tambahan, seperti kurangnya kerangka legislatif yang jelas untuk mengembangkan area publik, yang berarti bahwa konsep pembangunan terus mengabaikan penyandang disabilitas (Pujianti, 2018).

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari anggota masyarakat Indonesia, dengan hak, tanggung jawab, kesempatan, dan peran yang tidak beda dalam segala segi kehidupan dan penghidupan seperti orang Indonesia lainnya. Pengakuan ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Bank Dunia, sekitar 20%

penyandang disabilitas secara global berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dari segi ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan masyarakat, kondisi sosial penyandang disabilitas fisik seringkali rawan. Dalam beberapa kasus, terutama di daerah pedesaan, keluarga akan bertindak ekstrem untuk melindungi anggota keluarga yang mengalami disabilitas (Sukma, 2017).

Kesejahteraan ekonomi kaum rawan seperti difabel sangat penting supaya diperhatikan karena sebagai strategi pemberdayaan untuk mengupayakan kemampuan dengan memberi kepada mereka sehingga bisa melaksanakan aktifitas ekonominya seperti layaknya manusia dengan kondisi fisik yang sempurna. Hal itu juga dapat melindungi para difabel dari marginalisasi yang terkadang mereka temui di beberapa sektor masyarakat. Padahal, mereka butuh perhatian dan perlindungan khusus dari manusia lain selain pembatasan fisik mereka. Di sisi lain, jika kita melihat ajaran Islam, kita dapat melihat bahwa Islam secara aktif mendorong para pengikutnya untuk bersikap adil dalam sikap dan penilaian mereka terhadap orang lain, termasuk penyandang disabilitas. Meski dengan keterbatasan fisiknya, Islam mengakui dan menganggap keberadaan penyandang disabilitas. Rasulullah SAW pun pernah ditegur oleh Allah SWT dikarenakan beliau tidak menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu seorang sahabat yang tunanetra yaitu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Pada waktu itu, beliau Nabi Muhammad SAW masih berdiskusi dengan sahabat lain dari golongan Quraisy (Sasongko & Muhyiddin, 2019).

Difabel sama saja keberadaannya dengan manusia yang lain, tetapi realitanya terkadang dibedakan atau didiskriminasi. Konsep kesetaraan dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas mulai dihadirkan sebagai intervensi dan strategi mengatasi permasalahan dengan berbagai mekanisme (Puspitasari & Laksmono, 2021). Di salah satu penelitian yang dilakukan oleh Arief Burhan Efendi yang berjudul Implementasi *Diversity* Program Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada PT. Wangta Agung Kota Surabaya. Di penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada kebijakan lain tentang difabel yaitu terkait *diversty program* yang dimana pada PT Wangta Agung Kota Surabaya menerapkannya, perusahaan tersebut sudah secara baik dan memberi kesempatan perekrutan calon tenaga kerja bagi para penyandang disabilitas (Efendi, 2017).

Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi difabel ini juga pernah diteliti oleh Siti Aesah, Yhonanda Harsono dan Derizka Inva Jaswita (2020) dengan judul “Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”. Menurut penelitian, di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan cukup baik, namun belum optimal karena masih ada harapan yang belum terpenuhi dari penyandang disabilitas yaitu pemberian program edukasi dan *follow up* atau pelatihan yang berkelanjutan mengenai usaha ekonomi produktif, karena faktor utama keberhasilan program Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) menurut mereka adalah pengembangan sumber daya manusia terlebih dahulu (Aesah et al., 2020).

Pemerintah memegang peranan penting dalam mencapai tujuan negara, yang meliputi kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Pemerintah dengan proses dinamis yang sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku dengan tetap menghormati hak-hak warga negara lainnya. Hak warga negara sangat penting untuk dipertimbangkan bahwa negara melindungi hak warga negara melalui peraturan yang berlaku atau yang sudah diperjelas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dalam hal ini Dinas Sosial merupakan komponen pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan sosial dan masyarakat desa. Selain membantu masyarakat desa/kelurahan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. urusan pemerintahan sektor sosial. Frans Singkoh, J.E. Kawoon, dan Theresia Baturangka (2019) menyatakan bahwa Mengingat jumlah penyandang disabilitas yang berfluktuasi setiap tahun, hal ini memainkan peran penting dalam pemberdayaan individu penyandang disabilitas. (Rofiq, 2021). Peran Dinas Sosial yang dilakukan di Indonesia terkait pemberdayaan ekonomi difabel rata-rata sudah cukup baik akan tetapi peran itu belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Peneliti memiliki pandangan terhadap ekonomi difabel merupakan hal yang harus sangat diperhatikan oleh orang-orang yang sadar akan kesejahteraan semua orang, dalam hal ini yang berkaitan adalah Dinas Sosial

terkait bagaimana peran dan apa saja yang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi difabel yang dilakukan Dinas Sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sudah dijelaskan diatas yang menunjukkan cukup banyak jumlah difabel di Kota Pekalongan, karena hal itu difabel menjadi salah satu masyarakat yang tergolong kaum rawan dimana membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal tersebut menjadi masalah yang harus segera diupayakan atau diselesaikan supaya adanya kesejahteraan yang merata di Kota Pekalongan dari berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peran Dinas Sosial terhadap pemberdayaan ekonomi kaum difabel di Kota Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti dapat menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum rawan (difabel) di Kota Pekalongan?
2. Apakah kendala Dinas Sosial dalam melaksanakan peran pemberdayaan ekonomi difabel di Kota Pekalongan?
3. Bagaimana tinjauan perspektif Islam terkait pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Dinas Sosial terhadap kaum rawan (difabel) di Kota Pekalongan.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mendeskripsikan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kaum rawan (difabel) di Kota Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui kendala Dinas Sosial Kota Pekalongan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi difabel.
- c. Untuk mengetahui dalam perspektif Islam terkait yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum rawan (difabel) di Kota Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka peneliti mengharap pada penelitian ini memiliki manfaat dalam dari segi edukasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi wawasan tentang ekonomi terkait dengan difabel.
- 2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang metode pemberdayaan ekonomi pada kaum difabel.

3) Sebagai literatur dan referensi pada penelitian-penelitian setelahnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum difabel.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan ekonomi pada kaum difabel.
- 2) Memberikan pengalaman dan wawasan langsung terhadap penulis tentang pemberdayaan ekonomi pada kaum difabel.
- 3) Sebagai bahan evaluasi terhadap dinas social untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan kinerja terhadap masyarakat terkhusus kaum difabel.
- 4) Diharapkan penelitian ini menjadi hal baru terutama dibidang ekonomi pembangunan terkait pemberdayaan ekonomi kaum difabel.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dirangkai dalam beberapa urutan bab, yang masing-masing berhubungan dengan bab berikutnya. Bab-bab tersebut juga dipecah menjadi sub-bab untuk memungkinkan diskusi yang lebih terorganisir. Adapun untuk penyusunan penelitian ini lebih metodis, penulis memberikan pembahasan yang sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab awal ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta pembahasan

sistematis yang secara konkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori atau teori-teori pendukung yang digunakan untuk memaparkan tentang *library reseach* atau studi pustaka terkait dengan penelitian terdahulu. Kemudian juga mencantumkan dari kerangka berfikir suatu model atau konsep dari peneliti yang berkaitan dengan masalah yang ambil/identifikasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan kredabilitas data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian dibahas dalam bab ini, bersama dengan bagaimana data dijelaskan, bagaimana mereka dianalisis, dan bagaimana responden menanggapi kuesioner dan observasi.. Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi profil Dinas Sosial Kota Pekalongan dan membahas bagaimana peran Dinas Sosial terhadap ekonomi difabel yaitu terdiri dari peran sebagai pemerintah atau tugas fungsi pokok yang didalamnya berupa peran fasilitatif, peran edukasional, dan peran teknis. Yang kedua membahas tinjauan perspektif Islam terkait pemberdayaan yang dilakukan terhadap kaum difabel serta tanggapan dari kaum difabel sendiri terhadap

peran pemerintah yang dilakukan Dinas Sosial. Tentunya dalam pembahasan juga membahas tentang keberadaan dan kondisi para difabel di Kota Pekalongan yang butuh mendapat perhatian dari pemerintah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini yaitu bagian terakhir meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang memaparkan terkait kesimpulan yang diambil dari jawaban penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekalongan terhadap kaum difabel telah melaksanakan peranannya, namun peran tersebut dinilai belum maksimal. Hal itu bisa dilihat dari program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan, menurut hasil wawancara yang saya lakukan dari beberapa difabel, menunjukkan kurang puas nya para difabel terhadap peran yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekalongan. Hal itu ditunjukan dari data difabel yang menunjukkan bahwa masih minimnya program pemberdayaan yang berhasil dilakukan. Dan dalam penelitian ini yang hanya masuk dalam program pemberdayaan adalah peran fasilitator dimana peran tersebut berhasil mengeluarkan beberapa *output* yang jelas dari program pemberdayaan tersebut.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekalongan dalam pemberdayaan ekonomi kaum difabel pada dasarnya sudah memenuhi dan mencakup prinsip-prinsip pemberdayaan dalam Islam, seperti prinsip ukhuwah, prinsip ta'awun, dan prinsip keadilan. Namun untuk kedepannya para difabel mengharapkan agar Dinas Sosial lebih maksimal lagi dalam memberikan perhatian kepada para difabel supaya bisa lebih mempunyai kesejahteraan ekonomi seperti halnya manusia biasa lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Pekalongan untuk kedepannya bisa mendata lebih rinci lagi dalam pendataan jumlah difabel.
2. Dinas Sosial Kota Pekalongan dalam melakukan pemberdayaan dapat lebih dimaksimalkan lagi baik dari programnya maupun bentuk pemberdayaannya.
3. Dinas Sosial Kota Pekalongan lebih memperluas relasi jaringan untuk bekerjasama meningkatkan dalam hal pemberdayaan ekonomi difabel agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R., Esterilita, M., Rochman, U. H., & Mintarja, E. (2020). Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita DISABILITAS DAKSA DI KOTA BOGOR. *Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita*, 11–18.
- Aesah, S., Harsono, Y., & Jaswita, D. I. (2020). Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 210–221.
- Al-Makmuri, M. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Arianti, T. P. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas Di Kota Balik Papan. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(1), 173–185.
- Baturangka, T., Kaawoon, J. ., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Bugis, Z. K. (2021). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Desa Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman DIY)*.
- Efendi, A. B. (2017). *Implementasi Diversty Program Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada PT. Wangta Agung Kota Surabaya [Brawijaya]*. <https://www.diversityprogramconsortium.org/>
- Faozan, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syariah [IAIN Purwokerto]. In \ (Vol. 106, Issue 1). <http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01>
- Ghisra, C. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Tunarungu Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tunarungu Dan Lansia Pematangsiantar*. 2, 1–13.
- Hamid, H. (2016). Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *J+Plus Unesa* (Vol. 5, Issue 1).
- Handayana, S. (2016). Difabel Dalam Al Quran. *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id Jurnal of Disability Studies*, Vol. 3 No.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas* (D. P. Sarahtika & L. Hadiz (eds.)). The SMERU Research Institute.
- Hayati, S. (2019). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BINJAI* (Issue April, pp. 33–35). Skripsi UIN Sumatera Utara.

- Hayati, S., & Surya, M. A. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 16. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>
- Hermawan, T. S. S. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Hidayatullah, N., & Pranowo. (2018). Providing More Hope and Welfare for Persons with Disabilities. *Jurnal PKS*, 17(2), 195–206.
- Indonesia, P. (2016). Undang-Undang RI. *UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas*.
- Indriyani, E., & Sulistiyawati, S. (2021). Kebijakan Recofussing dan Relokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Serta Pengaruhnya Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Akibat Dampak Covid-19. *Pusat Pendidikan Kelautan Dan Perikanan, Kementerian*.
- Irwanto, Kasim, E. R., Fransiska, A., Lusli, M., & Siradj, O. (2010). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review. *Medical Journal of Australia*. <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1981.tb135719.x>
- Jamaludin, & Zahara, R. A. (2020). Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququq Insani) Dalam Penyandang Disabilitas(Difabel) Perspektif Fiqh Islam. *Legitima*, 2(2), 244–269.
- Kementerian Agama, R. I. (2021). Difabel Dalam Pandangan Agama dan Masyarakat. *Kemenag.Go.Id*.
- Khoirudin, A. (2019). Kesetaraan Derajat Manusia. *Al-Musawah*.
- Krisnada, K., & Widodo, S. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1), 91–104. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.1357>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Maryam, M. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Maulana, R. (2021). *Peran Dinas Sosial Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Difabel di Kabupaten Pematang Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*.
- Wawancara Pribadi*, (2022) (testimony of Mulyono).
- Nugrahani M. Hum, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Pekalongan, D. S. P. K. (2021). *Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026* (Issue 40). [https://pemkomedan.go.id/editor/gambar/file/RENSTRA DINAS](https://pemkomedan.go.id/editor/gambar/file/RENSTRA_DINAS)

PARIWISATA TAHUN 2021 - 2026.pdf

- Pekalongan, P. K. (2018). *Peraturan Walikota No 71 Tahun 2018*.
- Pekalongan, W. (2021a). *Peraturan Derah Kota Pekalongan*.
- Pekalongan, W. (2021b). *Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021*.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*.
- Prasojo, P. (2020). Analisis penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di kabupaten malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6683>
- Pujianti. (2018). *Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel Di Kota Pangkalpinang*. 144. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32942/>
- Puspitasari, C. D., & Laksmono, B. S. (2021). *Reviewing the Policy of People with Disabilities Employment in Government Agencies*. 13, 245–256.
- Ratna Sari, Y., Suharso, P., & Sukidin, S. (2018). Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Difabel Di Bidang Ekonomi Kreatif. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), 109. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.7613>
- Resmi, W., & Sosial, D. (2022). *Profil DinSosP2KB* (Issue April). <https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id/>
- Rofiq, R. (2021). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU*.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- Sasongko, A., & Muhyiddin. (2019). Rasulullah Pernah Ditegur Karena Abaikan Difabel. *Republica.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/pqd2y5313/rasulullah-pernah-ditegur-karena-abaikan-difabel>
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma. (2017). *Disabilitas, Pemberdayaan Melalui, Tubuh Dakwah, Fakultas Komunikasi, D A N Negeri, Universitas Islam Makassar, Alauddin*.
- Sulistiyani. (2015). *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Supriyadi. (2022). *Wawancara Pribadi*.

- Surwanti, A. (2014). *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. 5(1).
- Taufik, M., & Sanrego, Y. D. (2016). *Fikih Tamkin (Fikih Pemberdayaan)*. Qisthi Press.
- Wilaela, Fatah, N., & Khariunnas, J. (2017). Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ushuludin* 25(2):221.
- Yatmo Hutomo, M. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi* (pp. 1–2). Adiyana Press.
- Yusuf, P. D. A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (4 ed.)*. Kencana.
- Zuhad, W. S. . M. S. (2022). *Wawancara Pribadi*.